

JURNAL

# MEDIA HUKUM

## **TERAKREDITASI:**

No. 26/DIKTI/Kep/2005

No. 43/DIKTI/Kep/2008

No. 81/DIKTI/Kep/2011

No. 1130/E5.2/TU/2016

**JURNAL MEDIA HUKUM (JMH)** adalah jurnal ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dua kali setahun pada bulan Juni dan Desember. JMH memiliki visi menjadi jurnal ilmiah yang terdepan dalam pengembangan ilmu Hukum dan Syari'ah serta harmonisasi hukum positif Indonesia dengan prinsip-prinsip Syari'ah Islam. Redaksi JMH menerima naskah artikel laporan hasil penelitian empirik dan naskah hasil kajian teoritis yang sesuai dengan visi JMH. Naskah yang dikirim adalah artikel hasil penelitian empirik atau artikel hasil kajian teoritis. Naskah terdiri dari 15-20 halaman kwarto (A4) dengan spasi satu setengah. Naskah dilengkapi dengan biodata penulis. Naskah yang dikirim oleh penulis dan dinyatakan layak untuk dimuat dari luar UMY dikenai biaya administrasi sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

---

## **PENANGGUNG JAWAB**

Trisno Raharjo

## **KETUA DEWAN PENYUNTING**

Mukti Fajar ND

## **WAKIL KETUA DEWAN PENYUNTING**

1. Reni Anggriani
2. Tanto Lailam

## **ANGGOTA DEWAN PENYUNTING**

Yeni Widowaty  
Leli Joko Suryono  
Iwan Satriawan  
Nasrullah

## **STAF PELAKSANA**

1. Supriyadi
2. Sujanatun
3. Siti Nurhasanah
4. Imtiyaz Hanafiyah

## **DESAIN**

Djoko Supriyanto

## **ALAMAT REDAKSI**

Laboratorium Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jalan Lingkar Selatan Tamantirto, Kasihan, Bantul, DI Yogyakarta.

Telp. 0274-387656 psw: 220

Fax. 0274 -387646

email: [jurnalmediahukum@gmail.com](mailto:jurnalmediahukum@gmail.com)

[www.journal.umy.ac.id](http://www.journal.umy.ac.id)

## Daftar isi

- H. 1 *Dinamika dan Problematika Politik Hukum Lembaga Penyelesai Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia*  
NASRULLAH, TANTO LAILAM; Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- H. 14 *Urgensi Pengaturan Keamanan Maritim Nasional di Indonesia*  
DHIANA PUSPITAWATI, KRISTIYANTO; Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang
- H. 24 *Konstruksi Regulasi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Menuju Sistem Pemilihan Kepala Daerah yang Demokratis dan Aspiratif*  
SULARDI, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang  
TRI SULISTYANINGSIH; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang
- H. 35 *The Use of Gold Dinar and Silver Dirham in Moslem Countries in the Contemporary Era*  
MUCHAMMAD ICHSAN; Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- H. 42 *Pengaturan dan Implementasi Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara di Indonesia*  
BAGUS SARNAWA; Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- H. 53 *Kewenangan Komisi Kepolisian Nasional dalam Mewujudkan Tata Kelola Kepolisian Yang Baik*  
AWALUDDIN; Fakultas Hukum Universitas Tadulako PALU, Sulawesi Tengah
- H. 62 *Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha Milik Negara dalam Menumbuhkan Kemandirian Masyarakat di Sulawesi Selatan*  
ABDUL RAUF; STMIK Dipanegara Makassar, Sulawesi Selatan
- H. 71 *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Masyarakat Adat Di Kabupaten Pelalawan Terkait Dengan Penerbitan Ijin Lahan*  
MARYATI BACHTIAR, RISKA FITRIANI; Fakultas Hukum Universitas Riau
- H. 80 *Kedudukan Hukum Ibukota Kabupaten Setelah Dimekarkan Menjadi Pemerintah Kota*  
ALINAPIA; Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
- H. 88 *Implikasi Declaration of Conduct Laut Tiongkok Selatan Tahun 2002 Terhadap Proses Penyelesaian Sengketa*  
AGUS HARYANTO; Jurusan Hubungan Internasional FISIP, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto  
ARRY BAINUS; Jurusan Hubungan Internasional FISIP, Universitas Padjadjaran Bandung

# Kata Pengantar

Assalamu'alaikum wr, wb.

*Alhamdulillah*, setelah melalui proses panjang penyuntingan, akhirnya Jurnal Media Hukum (JMH) Volume 24 edisi nomor 1, Juni 2017 ini dapat diterbitkan. Sebagai suatu terbitan berkala ilmiah, Penyunting JMH berkomitmen untuk selalu berusaha meningkatkan kualitas terbitan yang selaras dengan "Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah" Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional. Selain itu mutu isi tulisan juga tetap diprioritaskan.

Dalam terbitan kali ini JMH menyajikan 10 Artikel terpilih yang dikirim oleh Penulis dari berbagai Perguruan Tinggi negeri dan swasta. Pada lembar pertama, disajikan artikel dari Nasrullah dan Tanto Lailam, dosen dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Beliau mengirimkan tulisan *Dinamika Dan Problematika Politik Hukum Lembaga Penyelesai Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia*. Artikel ini mengajukan diskusi tentang kesuksesan pilkada yang tidak hanya diukur dari tahapan pelaksanaannya, namun juga penyelesaian sengketa yang mengiringinya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, analisis, dan pendekatan kasus yang bertujuan untuk mengetahui latar belakang gagasan pembentukan Badan Pengadilan Khusus Pilkada untuk menyelesaikan sengketa pemilihan kepala daerah. Temuan dari penelitian ini adalah memberikan pandangan terbaik sebagai alternatif lembaga peradilan khusus penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah.

Selanjutnya, Dhiana Puspitawati dan Kristiyanto, dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Menulis tentang *Urgensi Pengaturan Keamanan Maritim Nasional Di Indonesia*. Artikel ini memfokuskan pada tiga hal, yaitu perbatasan wilayah laut, *IUU Fishing*, serta perbuatan perompakan dan kekerasan bersenjata di laut. Hasil studi yang telah dilakukan yaitu: meskipun kerjasama internasional dan regional sangat penting dalam keamanan maritim, ketersediaan instrumen hukum nasional tentang keamanan maritim sangat diperlukan. Sayangnya, Indonesia belum memiliki instrumen hukum tersebut.

Selanjutnya, bisa dibaca tulisan dari Sulardi dosen Fakultas Hukum dan Tri Sulistyaningsih dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang. Artikel dengan judul *Konstruksi Regulasi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Menuju Sistem Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis dan Aspiratif* mempertanyakan tentang peraturan tentang pilkada yang demokratis dan aspiratif untuk mewujudkan demokrasi dan tata pemerintahan yang baik, dari sentralis ke desentralisasi, dari otoriter ke demokrasi. Pendekatan penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme.

Selanjutnya adalah tulisan dari Muchammad Ichsan, dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang menulis tentang *The Use Of Gold Dinar And Silver Dirham In Moslem Countries In The Contemporary Era*, mengkaji mengenai fakta bahwa mata uang Dollar telah terdesak kelompok-kelompok Muslim di beberapa negara untuk menyeru menggunakan dinar emas dan dirham perak sebagai alat tukar. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebutuhan, aplikasi, dan hukum menggunakan dinar emas dan dirham perak. Studi ini menemukan bahwa dalam situasi saat ini kaum muslimin perlu menggunakan dinar emas dan dirham perak untuk kontrak keuangan mereka.

Tulisan berikutnya disajikan oleh Bagus Sarnawa dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Artikel dengan judul *Pengaturan Dan Implementasi Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Indonesia*. Tulisan ini mendiskusikan peran yang sangat penting dari ASN dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan bangsa. Oleh sebab itu, ASN adalah aparatur yang bebas dari intervensi politik. Dalam prakteknya, implementasi netralitas Aparatur Sipil Negara mengalami banyak hambatan dan kendala. Melalui Undang Undang No.5 tahun 2014, dilakukan upaya untuk meminimalisasi bahkan menghapuskan pengaruh partai politik terhadap Aparatur Sipil Negara, salah satu caranya adalah dengan membentuk Komisi Aparatur Sipil Negara.

Penulis berikutnya adalah Awaluddin, dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu. Dengan judul artikel

*Kewenangan Komisi Kepolisian Nasional Dalam Mewujudkan Tata Kelola Kepolisian Yang Baik.* Kajian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kewenangan yang dilakukan oleh Kopolnas dalam upaya mewujudkan tata kelola kepolisian yang baik di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kewenangan yang dilakukan oleh Kopolnas belum berjalan sesuai dengan harapan masyarakat, karena kewenangan yang dimiliki terlalu sederhana bagi sebuah komisi nasional yang bertugas membantu Presiden. Demikian halnya, terlampau lemah bagi sebuah komisi yang diharapkan menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja Kepolisian.

Tulisan berikutnya ditulis oleh Abdul Rauf, dosen STMIK Dipanegara Makassar. Penulis ini mengajukan artikel dengan judul *Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha Milik Negara Dalam Menumbuhkan Kemandirian Masyarakat di Sulawesi Selatan.* Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh BUMN merupakan wujud kepedulian dari pihak perseroan terhadap masyarakat sekitar dan lingkungan, yang dilaksanakan dalam bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) ditambah dengan program-program sosial lain yang disebut dengan istilah BUMN Peduli.

Selanjutnya, disajikan artikel yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Masyarakat Adat Di Kabupaten Pelalawan Terkait Dengan Penerbitan Ijin Lahan* yang ditulis oleh Maryati Bachtiar dan Riska Fitriani, dosen Fakultas Hukum Universitas Riau. Tulisan ini mencoba membahas tumpang tindih izin lahan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan, yang mengakibatkan tanah ulayat milik masyarakat adat diambil tanpa memperhatikan hak-hak penduduk setempat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini menyatakan perlu adanya Perda di Kabupaten Pelalawan yang mengatur perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat, sehingga sengketa dan konflik tanah adat/ulayat di Kabupaten Pelalawan dapat diminimalisir.

Lembar kesembilan dalam artikel ini memuat judul *Kedudukan Hukum Ibukota Kabupaten Setelah Dimekarkan Menjadi Pemerintah Kota*, yang ditulis oleh Alinapia, dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli

Selatan. Artikel ini mengajukan persoalan tentang Bagaimanakah kedudukan hukum dualisme Ibukota Kabupaten Induk Tapanuli Selatan setelah terjadinya pemekaran Kota Padangsidimpuan. Hasil penelitian menunjukkan akibat hukum ibukota rangkap yaitu secara umum dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan pemerintahan diantara kedua pemerintahan, dan secara khusus berupa terjadinya kesenjangan, berkurangnya etos kerja, adanya pengklasifikasian masyarakat, luntarnya adat "*dalihan natolu*" dan mudahnya masyarakat terprovokasi antara dua pemerintahan.

Artikel terakhir edisi ini mencantumkan tulisan mengenai *Implikasi Declaration Of Conduct Laut Tiongkok Selatan Tahun 2002 Terhadap Proses Penyelesaian Sengketa.* Tulisan ini adalah karya dari Agus Haryanto, dosen FISIP, Universitas Jenderal Soedirman dan Arry Bainus, dosen FISIP, Universitas Padjadjaran. Diskusi ini berangkat dari sengketa tumpang tindih kedaulatan di Laut Tiongkok Selatan (LTS) telah menjadi persoalan serius sejak tahun 1970-an. Sejauh ini, kesepakatan formal yang berhasil dicapai ASEAN dengan Tiongkok adalah *Declaration of Conduct (DoC)* yang ditandatangani pada tahun 2002. Hasil penelitian menunjukkan gambaran mengenai kelemahan DoC tahun 2002 yaitu memiliki obligasi, presisi dan delegasi yang rendah. Dengan demikian, dapat dipahami jika kemudian DoC tahun 2002 tidak mampu mengatur pihak – pihak yang berselisih. Oleh karena itu, diperlukan adanya *Code of Conduct (CoC)* untuk menindaklanjuti DoC

Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada para Mitra Bestari, Dewan Penyunting dan seluruh Staff Jurnal Media Hukum yang telah bekerja dengan baik. Berikut juga kami ucapkan terimakasih kepada Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta serta Tim Devisi Publikasi LP3M UMY yang memberikan dukungan sepenuhnya.

Wassalamualaikum wr. wb

Yogyakarta, Juni 2017

Ketua Penyunting

Mukti Fajar ND

# Pedoman Penulisan

## BENTUK NASKAH

Jurnal Media Hukum menerima naskah/ artikel hukum yang merupakan hasil penelitian maupun artikel hasil kajian teoritis baik dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.

## CARA PENGIRIMAN NASKAH

Penulis submit naskah dalam format file Microsoft Word ke url: <http://journal.umy.ac.id/index.php/jmh> kemudian mengirimkan naskah tersebut ke email [jurnalmediahukum@gmail.com](mailto:jurnalmediahukum@gmail.com).

## FORMAT NASKAH

Naskah yang dikirim adalah artikel hasil penelitian empirik atau artikel kajian teoritis. Naskah terdiri dari 15-20 halaman kuarto (A4) dengan spasi satu setengah. Naskah dilengkapi dengan biodata penulis. Semua halaman naskah, termasuk tabel, lampiran, dan referensi harus diberi nomor urut halaman. Setiap tabel atau gambar diberi nomor urut, judul dan sumber kutipan.

Sistematika penulisan disesuaikan dengan kategori artikel yang akan dipublikasikan di JURNAL MEDIA HUKUM. Sistematika penulisan untuk masing-masing kategori artikel adalah sebagai berikut:

### A. SISTEMATIKA NASKAH ARTIKEL HASIL PENELITIAN JUDUL ARTIKEL

Judul harus spesifik dan efektif (ringkas dan lugas) tidak melebihi 12 kata jika naskah menggunakan Bahasa Indonesia atau 10 kata jika naskah menggunakan Bahasa Inggris.

### PENCANTUMAN NAMA PENULIS DAN LEMBAGA PENULIS

Nama Penulis (tanpa gelar akademis atau indikasi jabatan atau kepangkatan), nama lembaga tempat kegiatan penelitian dilakukan dan alamat korespondensi lengkap berikut alamat e-mail dicantumkan di bawah judul.

## ABSTRAK

Naskah artikel harus disertai 1 (satu) paragraf abstrak yang menggambarkan secara ringkas esensi keseluruhan tulisan berupa permasalahan, metode penelitian dan hasil penelitian maksimal 200 kata diketik 1 (satu) spasi dalam 2 (dua) Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia disertai kata kunci (*key word*) tiga sampai lima kata.

Naskah ditulis dalam 4 bab, dengan sistematika bab sebagai berikut:

### I. PENDAHULUAN

Berisi latar belakang dan perumusan permasalahan.

### II. METODE PENELITIAN

Berisi metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian, antara lain meliputi: spesifikasi penelitian, materi penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.

### III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Berisi hasil penelitian berikut analisisnya.

### IV. SIMPULAN DAN SARAN

### B. SISTEMATIKA NASKAH ARTIKEL HASIL KAJIAN TEORITIS

#### JUDUL ARTIKEL

Judul harus spesifik dan efektif (ringkas dan lugas) tidak melebihi 12 kata jika naskah menggunakan Bahasa Indonesia atau 10 kata jika naskah menggunakan Bahasa Inggris.

#### PENCANTUMAN NAMA PENULIS LEMBAGA PENULIS

Nama Penulis (tanpa gelar akademis atau indikasi jabatan atau kepangkatan), nama lembaga tempat kegiatan penelitian dilakukan dan alamat korespondensi lengkap berikut alamat e-mail dicantumkan di bawah judul.

#### ABSTRAK

Naskah artikel harus disertai 1 (satu) paragraf abstrak

yang menggambarkan esensi keseluruhan tulisan berupa permasalahan dan hasil kajian diketik 1 (satu) spasi maksimal 200 kata dalam 2 (dua) Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia disertai kata kunci (*key word*) tiga sampai lima kata.

Naskah ditulis dengan sistematika bab sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Berisi latar belakang dan perumusan permasalahan.

II. PEMBAHASAN

Berisi pembahasan terhadap permasalahan yang dikaji dalam naskah.

III. SIMPULAN DAN/ ATAU SARAN

SUMBER KUTIPAN

1. Sumber Kutipan ditulis menyesuaikan sistem catatan perut (*body note* atau *side note*) ditulis sebagai berikut:

- a. Satu penulis: (Brownle, 1981: 845);
- b. Dua penulis: (Frucot dan Shearon, 1991: 311);
- c. Tiga atau lebih dari dua penulis: (Hotstede, et.al., 1990: 23);

d. Sumber kutipan yang berasal dari institusi sebaiknya dituliskan akronim institusi: (KRHN, 2000: 21)

2. Sumber kutipan yang berasal dari website dituliskan dengan susunan sebagai berikut: nama penulis, judul tulisan ("..."), nama website, alamat artikel, tanggal dan waktu download contoh: (Rohman, Dodi Arief, "Publik AS Dukung Bill Clinton", <http://www.kompas.com/kompas-cetak/1992/15/in/publ24.htm>, diunduh pada Senin, 24 Oktober 2005, jam 13.56 WIB).

DAFTAR PUSTAKA

Penulisan daftar pustaka disusun alfabetis dengan susunan setiap publisitas sebagai berikut:

BUKU-BUKU

Contoh:

Ahmad, Zainal Abidin, 1975, *Konsepsi Negara Bermoral Menurut Imam al-Ghazali*, Jakarta, Bulan Bintang.

JURNAL

Contoh:

Nurwijayanti, Septi, 2006, "Gagasan Amandemen Kembali UUD 1945", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 13, No. 3.

BAB DALAM BUKU

Contoh:

Criba, Robert, 1999, "Nation: Making Indonesia" in Emerson, Donald K (ed), *Indonesia beyond Suharto*, New York, An East Gate Publishers.

TESIS/DISERTASI

Contoh:

Indrayana, Denny, 2005, *Indonesia Constitutional Reform 1999-2002: An Evaluation of Constitutional Making in Transition*, Unpublished Thesis, Melbourne University, Australia.

MAKALAH

Contoh:

Sunny, Ismail, "Pembangunan Hukum Nasional dalam Pembangunan Jangka Panjang", Makalah untuk Seminar Nasional "Politik Hukum Pembangunan Nasional" oleh Fakultas Hukum UII, Yogyakarta: 20-22 Maret 1990.

Peraturan perundang-undangan disusun secara hirarkhikal